

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia pada saat ini ditandai dengan menguatnya tuntutan pertanggungjawaban atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Organisasi sektor publik sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014).

Bentuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya adalah mengelola keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal ini pelaksanaan perekonomian negara.

Laporan keuangan pada dasarnya disusun guna memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dilakukan serta untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi pada pemerintah daerah. Laporan Keuangan merupakan sumber informasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan, juga sebagai informasi bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor. Oleh karena itu, informasi yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk dari laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas dari pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan, atau laporan keuangan itu memenuhi kebutuhan pengguna (Kerry, 2014). Kualitas pelaporan keuangan juga dapat didefinisikan sebagai ketersediaan informasi yang disampaikan oleh proses pelaporan keuangan (Martines and Ferrero, 2014, 52). Kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan

keakuratan pelaporan keuangan perusahaan yang mencerminkan kinerja operasi dan kegunaannya untuk meramalkan arus kas di masa depan (Robinson, 2009,73)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan sudah berkualitas apabila (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) LKPD mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia masih menjadi isu terhangat yang perlu dikaji lebih dalam. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I tahun 2016, BPK mengungkapkan atas 221 Laporan Pemerintah daerah tahun 2015 yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan (IHPS I BPK RI, 2016)

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Republik Indonesia dalam Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester I Pertama 2016 terhadap 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 menunjukkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya diberikan pada 375 (71%) LKPD, pendapat yang memenuhi syarat sekitar 139 (25%) LKPD, dan tidak memberikan pendapat sekitar 23 (4%) LKPD. Hal ini disebabkan karena kerjasama pemerintah dalam mengoptimalkan anggarannya, sehingga perlunya tinjauan terhadap faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintahan.

Gambar 1.1
Trend Opini Pemeriksaan LKPD di Jawa Barat
Tahun Anggaran 2011 - 2017



Adapun kasus lainnya dari hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Barat mengatakan bahwa dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, masih ada tiga daerah yang belum berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan tahun 2017. Ketiga daerah tersebut

adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Secara umum ketiga Kota/Kabupaten ini tersandung masalah asset, terdapat beberapa asset yang tidak diketahui keberadaannya dan pemanfaatannya pun masih belum jelas. (Yedi Supriadi, 2017)

Berdasarkan kasus tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah kota/kabupaten tersebut belum berkualitas karena masih belum memenuhi karakteristik yang telah ditentukan oleh PP No.71 Tahun 2010 tentang basis akrual. Sehingga pemerintah perlu membenahi bagian penatausahaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam LKPD tahun 2015 yang belum memperoleh opini WTP umumnya disebabkan karena masih adanya kelemahan dalam standar akuntansi pemerintahan. Tidak seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat mencapai opini WTP disebabkan oleh : (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum disajikan secara wajar aspek material sesuai standar akuntansi pemerintahan, (2) Sistem pengendalian internal yang belum efektif, (3) Laporan keuangan pemerintah daerah/pemerintah pusat tidak diungkap secara memadai, (4) Belum dipenuhinya seluruh ketentuan undang-undang yang berlaku (Yuniar, 2018).

Berbagai upaya perbaikan kualitas dalam tata keuangan dari pemerintah daerah di Jawa Barat menunjukkan hasil. Kepala KanWil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan setelah dilakukan upaya terus menerus selama satu dasawarsa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK RI) akhirnya memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 5 Pusat (LKPP) tahun 2016. Capaian tersebut mencerminkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, kemudian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diungkapkan secara memadai, dan telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku. Perolehan opini WTP pada LKPP itu patut disyukuri karena seiring dengan peningkatan peringkat jumlah pencapaian opini WTP pada kementerian/lembaga. Dari semula 367 entitas pelaporan pada tahun 2015, menjadi 449 entitas pelaporan pada tahun 2016. Lebih lanjut di Jabar sendiri pada tahun 2016 terdapat 25 dari 28 pemda yang memperoleh opini audit WTP terhadap LKPS.

Untuk menciptakan kondisi keuangan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pengelola keuangan negara salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Berlakunya Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan

besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu berubah dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan dapat mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:54) Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu transaksi-transaksi dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan selain itu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, yang bertujuan agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik, tentunya perlu adanya peran dan usaha ekstra dari pemerintah dalam melancarkan proses peralihan ini. Di Indonesia implementasi menyeluruh atas basis akuntansi ini mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Untuk mengakomodir penerapan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Akuntansi akrual memberikan banyak manfaat bagi pemerintah seperti mampu menilai efektivitas dan kinerja organisasi, mengendalikan biaya organisasi (Kordstani dan Iranshahri, 2010). Pada prakteknya telah muncul

banyak masalah seperti yang ditunjukkan dalam hasil audit pada badan pengatur keuangan (BPK) pada tahun 2016 temuan tentang penerapan akuntansi akrual terjadi di pemerintah daerah. Masalah dalam penerapan akuntansi akrual disebabkan oleh pemerintah daerah tidak memiliki strategi dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (SAP) sebesar 69%.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 juga mengungkapkan beberapa permasalahan signifikan, yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual belum didukung dengan kebijakan akuntansi. Sebagai bagian upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara BPK telah melengkapi LHP LKPP Tahun 2015 dengan laporan tambahan berupa Laporan Pemantauan Tindak Lanjut LKPP Tahun 2007-2014 dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal. Ketua BPK mengharapkan DPR RI dapat membantu tindak lanjut LHP LKPP oleh Pemerintah sehingga tidak ada masalah yang sama pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh Pemerintah.

Pada Pemeriksaan yang dilakukan di Pemkot Bandung terdapat permasalahan dalam sertifikat aset yang tidak sesuai dengan prinsip standar akuntansi, yaitu senilai Rp 11 triliun. Hal tersebut dinilai nilai tidak sesuai standar, yang kemudian ditindak lanjuti pemda. Rp 9 triliun sudah bisa direvaluasi, dinilai kembali sesuai dengan NJOP sesuai dengan tahun neraca awal, sisanya Rp 2,5 triliun masih belum selesai. Yang lain masih ada aset yang tidak jelas ditemukan keterangan yang memadai aset itu ada dimana," katanya. Selain itu ada juga masalah-masalah yang belum bisa

diselesaikan Pemkot Bandung seperti terkait piutang pajak, persediaan utang jangka pendek (Merdeka.com, 2017)

Menurut BPK pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat dinilai belum berhasil melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual. Ini terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terkait laporan keuangan penda 2015 yang merupakan tahun pertama penerapan sistem laporan keuangan tersebut. BPK mengungkapkan permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan basis akrual dilingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat diantaranya adalah masalah penyusutan atas rehabilitasi atau renovasi asset tetap dan masalah penyajian dana BOS dan dana lainnya diluar APBD. Hal ini menjadi bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya sistem pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah” oleh Kadek Desianawati; Nyoman trisna Herawati; Ni Kadek Sinarwati (2014)
2. “Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” oleh Ningtyas, Pravitasari Eka dan Dini Widyawati. (2015)

3. “Pengaruh Standar akuntansi akrual Terhadap Kualitas laporan Keuangan” oleh Heshmat (2015)
4. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” oleh A.Dahri Adi Putra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015)
5. “Pengaruh SAP Akrual, Teknologi Informasi dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” oleh Nyoman Triyadi Agustiawan dan Ni Ketut Rasmini (2016)
6. “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” oleh Nurlis (2017)
7. “Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal dan Implementasi Standar Akuntansi Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan” oleh Rindu Rika Gamayuni (2017)
8. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem AKuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” oleh Kurnia Rahmah (2018)

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Standar Akuntansi Pemerintahan	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi SDM	Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah	Fungsi Audit Internal
Kadek Desianawati, Nyoman trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati	2014	√	-	-	√	-	-
Heshmat	2015	√	-	-	-	-	-
Ningtyas, Pravitasari Eka dan Dini Widyawati.	2015	√	-	-	-	-	-
A.Dahri Adi Putra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015)	2015	√	-	-	-	-	-
Nyoman Triyadi Agustiawan dan Ni Ketut Rasmini	2016	√	-	√	-	√	-
Nurlis	2017	X	-	-	√	-	-
Rindu Rika Gamayuni	2017	X	-	-	-	-	√
Kurnia Rahmah	2018	X	√	-	-	-	-

Alasan penulis memilih variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah karena masih adanya penelitian yang belum konsisten dengan hasil penelitian pengaruh standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap

kualitas laporan keuangan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlis (2017), Rindu Rika Gamayuni (2017), dan Kurnia Rahmah (2018) yang mengungkapkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurutnya salah satu faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah adalah kompetensi aparatur (SDM) yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Nurpaída dan Muslimin dan Abdul Kahar dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Sigi” Sedangkan penulis hanya menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai salah satu mekanisme dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah. Alasan peneliti menghapus variabel dari penelitian sebelumnya adalah karena audit internal sudah konsisten berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ade Suherman dan Yuyun Susati (2017), Daniel Susanto (2003), Aristanti Widyaningsih (2010), Lilir Sundayani (2013), Rahman S.Azie (2016) yang mengungkapkan bahwa secara parsial Kinerja Audit Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis memilih meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan pada BPK RI tahun anggaran 2015-2017, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tahun 2013-2015. Alasan penulis memilih

penelitian pada tahun 2015-2017 karena pada periode tersebut masih ada beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh lemahnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Selain itu terdapat perbedaan tempat yang akan diteliti, penelitian sebelumnya meneliti pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi, sedangkan penulis akan meneliti pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu dalam LHP semester I tahun 2016 BPK mengungkapkan dari 537 LKPD tahun hanya 375 LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sisanya 139 LKPD mendapat opini WDP dan 23 LKPD yang tidak memberkan pendapat.

2. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 mengungkapkan beberapa permasalahan signifikan, yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual belum didukung dengan kebijakan akuntansi
3. Masih ada daerah kabupaten dan kota yang belum berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di pemerintah daerah wilayah Jawa Barat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan beberapa masalah terhadap penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi akrual pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi akrual di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi akrual pada kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pihak pengguna.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain :

1. Bagi penulis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Standar Akuntansi Pemerintah secara umum
 - b. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian siding dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktek nyata di pemerintahan yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

1.5 Lokasi Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, maka penulis memperoleh data dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Moch. Toha No.164, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40252.